PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

(Studi di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)

Lutfi Dian Fajarudin¹, Kahar Haerah²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 2024

Revised February 2024

Accepted February 2024

Available online February 2024

email:

Lutfidianfajarudin46@gmail.com

1, kaharhaerah66@gmail.com2

*This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author.
Published by Triwikrama*

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu : (1) Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). (2) Untuk mengetahui kendala – kendala yang di hadapi dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Kemiri untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan sumber data premier dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bumdes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan beberapa hal sebagai berikut: (1) dalam pengembangan potensi Desa Kemiri Bumdes tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi sumber daya alam saja, tetap juga pada pengembangan terhadap sumber daya manusia; (2) BUMDes kembang di desa kemiri telah mampu berkontribusi terhadap PAD; (3) kualitas kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan dengan adanya peran BUMDes yang hadir ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan unit simpan pinjam yang dinaungi oleh BUMDes dapat menggerakkan masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa meskipun Bumdes Kemiri sudah cukup berhasil dalam melaksanakan perannya, namun hasil temuan dilapangan menunjukkan masih adanya beberapa kendala, misalnya : (1) kurangnya kontribusi Desa dalam permodalan sehingga pengembangan BUMDes sedikit terhambat; (2) seringnya terjadi bencana alam seperti longsor; (3) kurangnya permodalan dan support dari pemerintah desa; (4) BUMDes kekurangan karyawan sehingga ada beberapa hal yang kurang maksimal dalam penanganannya.

Kata kunci: Peran; Bumdes; Pendapatan Asli Desa

1. Pendahuluan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan diadakannya pembangunan secara nasional. Dengan adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat serta dapat membangkitkan roda perekonomian masyarakat luas. Salah satu dalam kegiatan pembangunan nasional yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah guna membangkitkan potensi – potensi yang masih tersembunyi di setiap daerah atau wilayah. Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan dibutuhkan komitmen, kerja sama dan kesadaran antara pemangku kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Salah satu wujud dari pembangunan nasional yaitu di mulai dari pembangunan kawasan dari titik yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pembangunan ditingkat wilayah perdesaan. Membangun dari pedesaan merupakan salah satu misi utama pemerintah, karena dengan adanya pembangunan yang terencana dan terstruktur akan membantu desa untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Pembangunan desa dimaksudkan untuk mengatasi masalah dan isu desa seperti halnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, sarana dan prasarana yang masih sulit untuk dijangkau atau diakses, fasilitas kesehatan yang masih rendah serta tingkat kemiskinan yang dominan lebih tinggi di daerah perdesaan. Hal tersebut terjawab dengan dibuktikannya dengan tingkat kemiskinan penduduk perdesaan kini mulai mengalami penurunan, menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasannya tingkat penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,73 juta orang. Dari 15,37 juta orang penduduk miskin pada bulan Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang penduduk miskin pada September 2021. (Sumber BPS 2021).

Desa merupakan salah satu wilayah terkecil di dalam tatanan pemerintah Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak berkembangnya revolusi ekonomi masyarakat seharusnya menjadi perwujudan terhadap kekuatan di berbagai bidang, Selain itu pembangunan Desa sangat tergantung pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan. Dengan demikian Desa diberikan wewenang lebih untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi wilayahnya masing – masing. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah,

Desa memasuki era kemandirian dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, pelayanan publik, dan keuangan

dengan demikian desa bukan lagi penunggu instruksi dari Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat. Hal tersebut juga selaras dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwasannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola daerahnya sendiri oleh pemerintah pusat dapat meningkatkan pembangunan yang signifikan serta menjadi pendorong semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan Pedesaan dan pemanfaatan potensi – potensi wilayah yang menghasilkan keuntungan sehingga akan dapat mendorong tercapainya Desa Mandiri namun harus tetap sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Dengan Pengelolaan sumber daya atau aset Desa dengan maksimal sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya pendapatan Desa, maka pembangunan pun dapat terealisasi dari berbagai sektor baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat

Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat dikatakan menjadi suatu patokan berkembang atau tidaknya suatu Pemerintahan Desa, karena dari sudut pandang inilah perekonomian masyarakat dapat di ukur. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 27 ayat 2 menerangkan bahwa salah satu penyumbang pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset Desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Agar potensi – potensi wilayah dapat di dimanfaatkan dengan baik, Salah satu bentuk memaksimalkannya yaitu dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa di sebut sebagai BUMDes yang akan menjadi pengelola sumber daya dan potensi yang ada.

Dalam hal ini selaras dengan tujuan didirikannya BUMDes yaitu mendorong perekonomian Masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan melakukan kegiatan melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi, mengola potensi Desa, mengelola lumbung pangan Desa, pemanfaatan aset Desa dengan baik, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat melalui penyediaan barang atau jasa dan juga melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital di Desa secara berkelanjutan. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menerangkan Bahawa BUMDes Merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha,

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Mewujudkan tujuan di dirikanya BUMDes itu sendiri berdasarkan asas gotong royong dan semangat kekeluargaan yang tinggi dengan prinsip profesional, memprioritaskan sumber daya lokal, partisipatif, terbuka dan bertanggung jawab, serta berkelanjutan. Semakin berkembangnya BUMDes maka akan meningkat pula pendapatan Asli Desa, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa maka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa pun dapat di lakukan dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya pembangunan Desa maka akan mempermudah Desa di kenal oleh khalayak umum sehingga memperbanyak opsi masyarakat untuk memilih usaha yang akan di jalankan, dan di harapkan akan mempermudah perputaran roda perekonomian di Desa sehingga dapat tercapainya Desa mandiri.

Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif saat ini salah satunya adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Berdasarkan Perdes Desa Kemiri Tahun 2022 pasal 26 menerangkan bahwa Salah satu prioritas pengelolaan Dana Desa (DD) adalah BUMDes. Dengan di prioritaskanya BUMDes dalam perdes maka di harapkan agar di pergunakan dengan maksimal serta di harapkan Pemerintah Desa mampu berpola kreatif dan inovatif dalam membangun BUMDes kedepannya

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pendorong perekonomian warga Desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala sebagaimana yang dijelaskan menurut (Sutoro Eko didalam bukunya Desa membangun Indonesia 2014. 262-264) antara lain:

1. Kepemimpinan manajerial dan tata kelola . Merupakan faktor dasar yang menjadi penentu kesehatan dan keberlanjutan BUMDes. Jika kepemimpinan dan manajerial serta tata kelola BUMDes sangat buruk, maka BUMDes dengan sangat cepat akan mati suri.
2. Skala dan Jangkauan Usaha, BUMDes yang saat ini menjalankan bisnis eksternal atau produksi dan distribusi hasil pertanian keluar Desa umumnya akan rentan dan mudah untuk gulung tikar dikarenakan skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.
3. Emansipasi Lokal, BUMDes yang tumbuh dari emansipasi lokal akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada BUMDes yang lahir karena adanya imposisi pemerintah. BUMDes yang lahir karena adanya imposisi pemerintah umumnya akan berjalan tidak mulus. Kesan pertama yang timbul dari perspektif masyarakat adalah bahwa BUMDes merupakan

proyek yang di jalankan oleh pemerintah, seperti proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDes terhadap perspektif masyarakat sangat lemah.

4. Kerjasama, kurang adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik akan semakin menghambat pertumbuhan BUMDes.
5. Tradisi Berdesa, tidak adanya tradisi berdesa dengan kekayaan modal sosial serta modal politik, sangat berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Seperti tidak ditemukanya tradisi gotong royong, kerjasama, swadaya dan solidaritas akan menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya suatu Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh informasi dari ketua BUMDes Kembang yakni Bu Luluk widiawati bahwa BUMDes Kembang mempunyai usaha yang sudah berjalan yaitu usaha air bersih dan pembiayaan pembayaran pulsa, listrik dan PDAM. Usaha air bersih dilaksanakan oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Sedangkan usaha pembiayaan pembayaran pulsa, listrik dan PDAM dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) online. Dengan adanya potensi usaha tersebut BUMDes Desa Kemiri diharapkan dapat menyumbang Pendapatan Asli Desa dan juga membangun alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan perekonomian Desa dan khususnya masyarakat Desa Kemiri. HIPPAM merupakan usaha air bersih yang masih menjadi titik fokus pembenahan. Pertama kurang besarnya pipa paralon yang di pasang pada pipa inti sehingga aliran debit air yang di keluarkan kurang maksimal. Sedangkan permasalahan yang di hadapi sejauh ini oleh BPOB yaitu kurang maksimalnya pelayanan yang di berikan BUMDes karena hanya terdapat satu Komputer yang saat ini dapat di operasikan di dalam kantor sedangkan kondisi komputer tersebut sekarang kurang memadai dan kurang efektif untuk di gunakan . Selain itu dalam pengelolaannya BUMDes tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan keterbatasan pemahaman dan tingkat pendidikan tentu menjadi tanda tanya besar akan outputnya.

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan referensi oleh peneliti dalam penulisan ini. Penelitian oleh Etha Listiany Supardi , Gideon Setyo Budiwitjaksono (2021) yang berjudul "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".Jenis penelitian ini adalah Deskriptif serta metode yang di gunakan yaitu kualitatif. Proses pengumpulan data menggunakan 3

tahapan yaitu reduksi data merupakan data yang di peroleh melalui bumdes, melakukan wawancara dengan pihak BUMDes dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat 3 jenis usaha yang saat ini di jalankan oleh BUMDes Desa Bungurasih yaitu gedung serbaguna, lapangan sepak bola, dan lahan parkir makam. Terdapat penurunan angka pendapatan BUMDes Desa Bungurasih yang mendukung Pendapatan Asli Desa selama pada periode 2019 – 2020 yaitu berkurang Rp 200.000.000.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Senjani (2019) berjudul “Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa studi di Desa Kerten, Klaten, Jawa Tengah” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap pihak BUMDes serta Dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah BUMDes Ngudi mulyo hingga saat ini belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa dikarenakan sistem pengelolaan yang masih sederhana hanya terdapat kas masuk dan keluar dan belum menerima permodalan dari luar sehingga provit yang di dapat oleh BUMDes di gunakan untuk mengembangkan BUMDes dan menggaji pengelola saat ini serta permodalan yang belum mencukupi untuk pengembangan yang lebih signifikan. Terdapat 2 usaha yang saat ini berjalan di BUMDes Ngudi Mulyo yaitu Air Minum RO Quaten dan Madu Lanceng, sistem promosi produk yang masih mengandalkan secara langsung (dor to dor), pendistribusian yang kurang maksimal karena terkendalanya kendaraan yang di miliki serta kurang terpenuhinya kebutuhan pengelola yang seperti pegawai harian lepas. Solusi setrategi yang di tawarkan oleh peneliti yaitu perlu di perbaharui sistem menejemen keuangan, menejemen produksi, menejemen pemasaran, menejemen pendistribusian serta menejemen Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDes.

Selanjutnya, penelitian oleh Rahmat B (2020) dengan judul penelitian “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara tringaluasi atau gabungan data serta sumber data di peroleh melalui data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner, data dari pihak terkait BUMDes dan dokumentasi. Hasil penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa kondisi masyarakat Desa Bungin mayoritas merupakan pekerja buruh tani dan petani, sehingga perekonomian masyarakat lambat untuk berkembang. Terdapat dua usaha yang saat ini di jalankan oleh BUMDes Bungin yaitu Bengkel servis kendaraan dan Penggemukan sapi.

Berdasarkan penelitian terdahul yang relevan belum pernah ada yang menuliskan tentang peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatkn Hasil Desa di desa Kemiri, kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hal ini menjadikan suatu kebaruan untuk diteliti dan dituliskan.

Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) definisi Peran “Peranan (role) merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status), apabila seseorang berkomitmen melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran”. Peranan merupakan harapan-harapan yang di bebankan kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan komitmen pada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Setiap individu mempunyai berbagai macam peranan yang bersumber dari pola-pola pergaulan kehidupannya. Hal ini berarti bahwa peranan bagian yang menentukan apa yang akan dilakukanya terhadap masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam oranisasi masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan suatu rangkaian norma-norma yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang hal apa yang dapat di berikan atau sumbangsihkan oleh individu dalam kelompok masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang menggambarkan sebagi perilaku individu yang penting bagi struktur sosial di dalam masyarakat.

Perlu disinggung mengenai fasilitas-fasilitas bagi peranan individu. Masyarakat biasanya memberikan kepercayaan berupa fasilitas untuk menjalankan perananya. Lembaga-lembaga masyarakat merupakan bagian yang banyak memberikan peluang-peluang bagi individu yang mampu untuk menjalankan perananya. Terkadang perubahan struktur golongan pada masyarakat juga menyebabkan fasilitas-fasilitas pelaksana peran bertambah. Seperti halnya perubahan suatu organisasi di sekolah yang memerlukan penambahan tenaga didik atau guru, pegawai administrasi dan lain sebagainya. Akan tetapi juga dapat mengurangi peluang-peluang apabila terpaksa di butuhkan rasionalisasi akibat adanya perubahsn terhadap struktur atau organisasi. (Soerjono Soekanto (2013: 214)

Peran BUMDes

BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang akan dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk dan mengacu berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Dapat di simpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Maryunani, 2008: 35).

Menurut pendapat Maryunani (2008:51) ciri-ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial yaitu :

1. Sumber modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebesar (51%) dan yang bersumber dari swadaya masyarakat sebesar (49%) serta harus melalui penyertaan modal (saham atau andil).
2. BUMDes dimiliki oleh Pemerintah desa dan dikelola secara Bersama-sama.
3. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotongroyong.
4. BUMDes diawasi secara Bersama-sama (Pemdes, BPD, anggota).
5. Usaha yang dijalankan berdasarkan pada pengembangan potensi Desa secara umum.
6. Menggunakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
7. Peraturan yang berada di dalam BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
8. Keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan PAD
9. Pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
10. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Menurut Purnomo (2004:17- 18), maksud dan tujuan pembentukan (BUMDes) adalah sebagai berikut:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian di desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Menurut pandangan Seyadi (2003:16) peranan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Mengembangkan potensi serta kemampuan perekonomian masyarakat Desa
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan Desa serta pendapatan masyarakat

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes merupakan Lembaga usaha Desa yang bergerak pada bidang ekonomi serta membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang atau jasa.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian pada penulisan ini adalah peran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiri dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa serta kendala yang dihadapi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain data tersebut peneliti juga memperkuat dengan data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan langkah awal observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan, dirangkum/direduksi, kemudian data di paparkan dengan pembahasan dan terakhir ditarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Kemiri

Desa merupakan ujung tombak berkembangnya sebuah revolusi ekonomi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya atau aset desa secara maksimal. Pemanfaatan potensi maupun aset desa secara menyeluruh diwujudkan dengan terbentuknya sebuah Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) yang dapat mendorong perekonomian masyarakat maupun Pendapatan Asli Desa (PAD).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berperan sebagai perwujudan sebuah Desa Mandiri apabila dapat mengelola sebuah potensi desa menjadi ekonomi yang produktif. Peningkatan pendapatan asli desa oleh BUMDes dapat diupayakan melalui tindakan yang serius dalam pengelolaan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan pemanfaatan potensi desa yang dimiliki. Kebutuhan masyarakat desa dalam hal ini dapat berupa kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder.

Peran BUMDes dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa Kemiri sudah relatif bagus, karena dalam pengembangan potensi tidak berfokus pada pengembangan potensi sumber daya alam saja, namun pengembangan terhadap sumber daya manusia turut diperhatikan sehingga dapat berdampak pada kualitas ekonomi masyarakat desa kemiri, BUMDES Kemiri dapat memanfaatkan dan mengembangkan baik potensi sumber daya alam maupun peluang usaha lainnya yakni dengan adanya pengadaan air bersih dan layanan digital yang dapat dimanfaatkan dalam pembayaran listrik maupun lainnya. BUMDes Desa Kemiri juga dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dengan pengadaan air bersih yang layak dalam kebutuhan sehari-hari sehingga dapat merubah kebiasaan masyarakat yang pada awalnya hanya bergantung pada air sungai. Selain itu dapat diketahui bahwa BUMDes melalui salah satu unit usahanya dapat membantu masyarakat melalui usaha permodalan.

Selain itu, peran BUMDes di Desa Kemiri membawa perubahan dan perkembangan bagi Desa Kemiri dalam mewujudkan Desa Mandiri yang dibuktikan dengan adanya unit usaha unggulan berupa pengadaan air bersih bagi masyarakat yang akan berdampak pada sektor perekonomian baik bagi Desa maupun masyarakat Desa Kemiri. BUMDes juga turut berkontribusi terhadap pendapatan asli desa (PAD) namun dengan jumlah yang terbatas, setiap tahunnya BUMDes selalu memberikan kontribusinya terhadap PAD yang dapat dilihat dalam APBDes. Kualitas kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan dengan adanya peran BUMDes yang hadir ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan unit simpan pinjam yang dinaungi oleh BUMDes dapat menggerakkan masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM, sehingga akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang akan merujuk kepada kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri. Desa Kemiri dapat dikatakan mengalami peningkatan dengan adanya unit HIPPAM atau pengadaan air bersih oleh BUMDes, terutama peningkatan kualitas sadar akan kebersihan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuktikan dengan masyarakat sadar akan pentingnya setiap

rumah memilik MCK sendiri dan tidak mengandalkan semua kegiatan rumah tangga pada air sungai. Selain itu dengan adanya unit Simpan Pinjam dan Desa Wisata dibawah naungan BUMDes, dapat menggerakkan masyarakat menjadi pelaku UMKM yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang meningkat akan berdampak pula pada kualitas kehidupan masyarakat di Desa Kemiri.

Namun dalam hal ini BUMDes Kemiri juga memiliki beberapa kendala, kendala yang paling utama dihadapi oleh BUMdes yakni kurangnya permodalan yang diberikan oleh pemerintah Desa Kemiri kepada BUMDes. Kurangnya permodalan yang diberikan oleh pemerintah desa membuat BUMDes sulit untuk berkembang sehingga akan berdampak pada penurunan kualitas unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Kurangnya SDM juga berdampak pada kualitas penanganan secara maksimal yang dilakukan oleh BUMDes.

5. Simpulan

Peran BUMDes dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa Kemiri sudah relatif baik, karena dalam pengembangan potensi tidak berfokus pada pengembangan potensi sumber daya alam saja, namun pengembangan terhadap sumber daya manusia turut diperhatikan sehingga dapat berdampak pada kualitas ekonomi masyarakat desa kemiri.

BUMDes kembang di desa kemiri sendiri sudah berperan dalam memberikan kontribusi secara aktif setiap tahunnya terhadap PAD di Desa Kemiri. Peneliti mendapatkan data empat tahun terakhir yakni pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Di tahun 2019 hingga 2020 terdapat kontribusi BUMDes yang cukup besar terhadap PAD yakni Rp 40.000.000, akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan yang sangat drastis yakni Rp 4.000.000 dikarenakan adanya virus Covid 19. Hal ini wajar karena semua Bumdes di Kabupaten Jember mengalami hal yang sama.

Kualitas kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan dengan adanya peran BUMDes yang hadir ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan unit simpan pinjam yang dinaungi oleh BUMDes dapat menggerakkan masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM, sehingga akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang akan merujuk kepada kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri.

Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa meskipun Bumdes Kemiri sudah cukup berhasil dalam melaksanakan perannya, namun hasil temuan dilapangan menunjukkan masih adanya beberapa kendala, misalnya : (1) kurangnya kontribusi Desa dalam permodalan sehingga pengembangan BUMDes sedikit terhambat; (2)

seringnya terjadi bencana alam seperti longsor; (3) kurangnya permodalan dan support dari pemerintah desa; (4) BUMDes kekurangan karyawan sehingga ada beberapa hal yang kurang maksimal dalam penanganannya.

Daftar Referensi

- [1] Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih". *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148. 2021.
- [2] Senjani, Y. P. "Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa studi di Desa Kerten, Klaten, Jawa Tengah". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40. 2019
- [3] "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang". *Jurnal Eksekutif*, 3(3).2020